

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batam merupakan wilayah yang menjalankan otonomi daerah dengan landasan UU No. 23 Tahun 2014 yakni hasil gubahan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar-dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam suatu daerah. Otonomi daerah ditujukan untuk memberikan kebebasan bagi tiap-tiap daerah dalam mengelola potensi daerah secara optimal guna untuk pembangunan daerah agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Suatu daerah dituntut untuk dapat mandiri dalam merancang dan mengelola program-program pembangunan di daerahnya sendiri. Dalam hal ini, diperlukannya pendanaan pada proses pembangunan supaya bisa berlangsung berdasarkan rancangan yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan program-program dalam rangka peningkatan pembangunan, pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam penggalan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan atau sumber keuangan lainnya guna membiayai pengeluaran untuk pembangunan daerah.

Pembangunan daerah dapat dikatakan sebagai bentuk aktifitas yang diselenggarakan pemerintahan berupa pelayanan yang dibebankan kepada suatu daerah yang menjadi bagian dalam pembangunan nasional. Pada pembangunan suatu daerah terdapat rencana awal yaitu rencana dalam membangun daerah agar terjawabnya kebutuhan maupun persoalan pembangunan yang berguna bagi

berlangsungnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan adil. Maka dari itu Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan melakukan pengoptimalan sumber pendapatan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Akhirman, 2016).

PAD yakni pendapatan yang dikutip pemerintah daerah dan juga dijadikan sebagai suatu indikator untuk menentukan seberapa mandiri daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena PAD juga menjadi pemasukan untuk daerah yang sumbernya yaitu daerah itu sendiri (Putra, 2018). Pajak daerah menjadi salah satunya sumber PAD yang diharapkan dapat memberi kontribusi bagi daerahnya sendiri agar dapat memberi kelancaran dalam pembangunan daerah (Effendi & Purba, 2019).

Kota Batam adalah suatu kota industri dan didalamnya terdapat penduduk yang terbilang tidak sedikit. Kota Batam merupakan suatu kota yang dijadikan untuk destinasi berwisata oleh wisatawan asing dan kota yang dijadikan sebagai tujuan untuk mencari pekerjaan oleh pekerja berasal kota luar maupun negara tetangga misalnya Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini tidak sedikit pekerja dari luar kota yang memutuskan untuk tinggal lebih lama dan menetap di kota tersebut. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan bertambahnya penduduk di Kota Batam tersebut.

Bertambahnya penduduk di Kota Batam juga dapat dilihat dari tingkat kemacetan yang terjadi setiap hari di titik jalan tertentu. Kemacetan itu terjadi tentu saja disebabkan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor pada tiap tahunnya seperti kendaraan beroda empat ataupun beroda dua. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam dan semakin banyak

kendaraan roda empat ataupun roda dua yang berlalu lalang di Kota Batam, sejalan dengan hal itu masalah lain yang dapat dilihat yaitu permasalahan akan kebutuhan ruang parkir. Kebutuhan akan ruang parkir semakin lama akan semakin meningkat, maka dari itu dibutuhkan peran Pemerintah Daerah Kota Batam untuk menyediakan ruang parkir yang memadai supaya mampu menampung seluruh aktivitas dari kendaraan bermotor di Kota Batam (Riyanda & Dompak, 2017).

Potensi yang dimiliki Kota Batam untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah terbilang cukup besar terutama dalam sektor perpajakan. Pemungutan pajak pada dasarnya dilakukan pemerintah pusat namun untuk realisasi maupun penerimaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam memungutan pajak bertujuan untuk membuat peningkatan penerimaan daerahnya. Pemerintah Daerah Kota Batam mengharapkan pajak setiap tahunnya yang diterimanya mengalami peningkatan serta mencapai target setiap tahunnya.

Pengelolaan pajak daerah salah satunya oleh Pemerintah Daerah Kota Batam yakni Pajak Parkir. Penetapan Pajak Parkir merupakan alternatif yang masuk akal untuk pungutan pengguna jalan yang membawa manfaat serupa dalam kemacetan dan pengurangan perjalanan kendaraan (Ball, 2019). Pajak Parkir terbilang cukup berpotensi untuk memberi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi setiap tahunnya. Adanya penerimaan dari Pajak Parkir dalam perwujudan sasaran pembangunan yang berhubungan dengan peran pajak pada kegiatan ekonomi, diperlukannya peran dari masyarakat untuk melakukan kewajiban sebagai wajib pajak, dan

diperlukannya peran pemerintah daerah sebagai pemungut pajak. Proses pembangunan dapat tercapai apabila perannya pemerintah daerah perihal memungut dan mengelola pajak telah efektif.

Pemerintah Daerah Kota Batam tiap-tiap tahun menargetkan pada pemungutan Pajak Parkir untuk dijadikannya sebagai sumber penerimaan daerah. Namun dalam penentuan targetnya, hasilnya belum dapat mencapai target yang direncanakan. Realisasi penerimaan Pajak Parkir bisa saja lebih rendah ataupun tidak mencapai sasaran yang telah ditentukan Pemerintah Daerah tersebut. Dalam hal tersebut sangat penting mengetahui apakah pemungutan Pajak Parkir di Kota Batam telah berjalan efektif ataupun sebaliknya.

Efektivitas yakni suatu pengukuran berguna untuk mengetahui seberapa berhasil sebuah organisasi dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila sasaran yang telah ditetapkan terpenuhi, hal itu bisa disimpulkan jika aktivitas yang dilakukan dalam organisasinya telah berjalan efektif (Wardani & Fadhlia, 2017).

Efektivitas pemungutan Pajak Parkir dihitung berdasar dari realisasi Pajak Parkir dan data target Pajak Parkir. Apabila semakin besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir, maka Pemda Kota Batam dikatakan pemungutan Pajak Parkir sudah efektif. Sebaliknya begitu juga jika semakin kecil tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir, maka hal tersebut menandakan jika peran Pemerintahan daerah dalam kegiatan memungut pajak masih belum maksimal.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemungutan pajak sangat diperlukan persiapan yang matang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor

perpajakan di Kota Batam. Maka dari itu bisa dikatakan jika pemungutan Pajak Parkir dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan efektif ataupun optimal maka hasil pemungutannya bisa berguna untuk sumber pemasukan yang besar untuk Pemerintah Daerah. Potensi perkembangan penerimaan PAD Kota Batam, dapat ditunjukkan berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Data PAD Kota Batam Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2016	909.266.681.460,69	881.268.969156,50	96,92
2	2017	1.086.585.819.982,57	974.124.203.684,08	89,65
3	2018	1.235.027.230.923,76	1.084.608.191.852,99	87,82
4	2019	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36
5	2020	1.032.354.004.000,27	975.568.562.748,32	94,50

Sumber : Data Realisasi Anggaran BP2RD Kota Batam

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa PAD Kota Batam tiap-tiap tahun terjadi fluktuasi. Mulai tahun 2016 hingga tahun 2017 PAD mengalami penurunan persentase sebesar 7,27% dengan capaian senilai 89,65%. Berikutnya tahun 2018 PAD Kota Batam kembali menurun sebanyak 1,83% dengan persentase sebesar 87,82%. Sementara pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 1,54% dengan persentase 89,36% dan pada tahun 2020 PAD Kota Batam kembali mengalami sedikit peningkatan sebanyak 5,14% dengan persentase senilai 94,50%.

Selain data pada tabel diatas, berikut ini merupakan penyajian data tentang target Pajak Parkir beserta realisasinya.

Tabel 1.2 Target beserta Realisasi Pajak Parkir pada BP2RD Kota Batam Tahun 2016–2020

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2016	6.000.000.000	6.012.266.105,00	100,20%
2	2017	6.500.000.000	6.966.070.572,66	107,17%
3	2018	12.000.000.000	10.978.856.006,00	91,49%
4	2019	13.008.000.000	9.102.725.139,00	69,97%
5	2020	7.604.815.000	5.788.643.634,00	76,12%

Sumber: Data Realisasi Anggaran BP2RD Kota Batam

Berdasar dari tabel diatas dinyatakan untuk 2016 sampai tahun 2020 terjadinya fluktuasi pada penerimaannya Pajak Parkir dan mengalami selisih nilai yang berarti. Tingkat penerimaannya Pajak Parkir paling tinggi terjadi di tahun 2017 maka dari itu dikatakan bahwa di tahun 2017 penerimaannya Pajak Parkir sangat efektif dengan persentase sebesar 107,17%. Tingkat penerimaan Pajak Parkir tahun 2016 mencapai persentase senilai 100,20%. Berikutnya tahun 2017 mengalami peningkatan persentase senilai 6,97% dan persentasenya mencapai sebanyak 107,17%. Kemudian untuk tahun 2018 persentasenya tingkat penerimaan Pajak Parkir mengalami menurun senilai 91,49% dan tahun berikutnya yakni 2019 penerimaannya Pajak Parkir kembali mengalami penurunan sebanyak 21,52% dengan capaian persentasenya senilai 69,97% dan kemudian terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 6,15% dengan capaian persentasenya senilai 76,12%. Sedangkan tingkat penerimaannya Pajak Parkir terendah yakni tahun 2019 dengan sebanyak 69,97%.

Melalui data yang disajikan pada tabel 1.2 tentang target Pajak Parkir beserta realisasinya, disimpulkan jika penentuan targetnya Pajak Parkir oleh Pemerintah Daerah Kota Batam tiap-tiap tahun rata-rata mengalami peningkatan.

Sementara untuk realisasi penerimaannya setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan, keadaan tersebut bisa dikatakan bahwasanya realisasi Pajak Parkir tidak menyeimbangi target yang sudah ditentukan.

Melalui uraian-uraian yang dipaparkan, penulis maka tertarik mengangkat judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada paparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran wajib pajak perihal pembayaran pajak parkir.
2. Kurangnya pelayanan yang dilakukan pihak pemungut pajak yang menyebabkan ketidakpuasan para pengguna kendaraan bermotor.

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan terarah serta sesuai dengan harapan, maka diperlukannya batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, yakni antara lain:

1. Fokus pada penelitian ini yaitu efektivitas pemungutan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data target dan realisasinya Pajak Parkir serta data PAD Kota Batam tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna menambah pengetahuan terkait persoalan perpajakan terutama mengenai Pajak Parkir.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian bisa dijadikan sebagai referensi guna untuk melaksanakan penelitian selanjutnya tentang efektivitas pemungutan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliitian berikutnya di Universitas Putera Batam serta dapat juga dijadikan sebagai tambahan karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

2. Aspek Praktis

a. Bagi BP2RD Kota Batam

Diharapkan lewat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang efektivitas pemungutan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, dan juga mampu dipergunakan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait guna membantu menganalisis pemungutan Pajak Parkir.